

Konsep Pengembangan Pendidikan Islam Ideal di Indonesia*

Saiful Muslim

Guru Besar Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Mataram

Pendahuluan

Peningkatan kualitas sumber daya manusia kini terasa semakin urgen, terlebih melihat tekanan-tekanan global terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia yang memiliki intensitas jauh lebih tinggi di abad ke-21. Pergantian waktu ke abad 21 bukanlah sekadar pergantian waktu biasa, melainkan suatu proses yang membawa perubahan-perubahan dalam kehidupan kita, yang diperkirakan mengakibatkan terjadinya persaingan yang sangat tinggi. Istilah lain yang sering disebutkan menggambarkan situasi abad 21 adalah *globalisasi*, yaitu suatu proses yang seakan-akan menyatukan seluruh bagian dunia

ke dalam suatu model kehidupan bersama (*global village*); proses itu cenderung menghilangkan batas-batas teritorial antar negara dan menghapuskan hambatan-hambatan untuk lalu lintas sumberdaya, komoditas, dan informasi.

Sebagai realisasi dari kecenderungan globalisasi itu, antara lain adalah disepakatinya kawasan perdagangan ASEAN (AFTA) tahun 2003 dan disepakatinya perdagangan bebas antar negara APEC yang puncaknya dijadwalkan 2020. Indonesia termasuk ke dalam dua kesepakatan perdagangan bebas itu.

Perdagangan bebas tersebut akan berpengaruh terhadap berbagai lini kehidupan, tidak hanya para pedagang atau produsen barang. Dengan bebasnya sumberdaya luar masuk ke Indonesia, maka lapangan kerja kita sudah barang tentu dapat diisi oleh sumber daya asing dengan kita secara bersama. Artinya, kita harus bersaing dari segi mutu dengan mereka. Informasi-informasi dari media massa luar negeri yang bebas memasuki wilayah negara kita akan memperkenalkan apa saja yang ada di luar, termasuk cara hidup, nilai-nilai budaya, dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Informasi-informasi itu, baik atau buruk, dapat secara berangsur-angsur berakulturasi dengan nilai-nilai budaya kita.

Globalisasi dan era perdagangan bebas ini sudah barang tentu menghendaki peningkatan kualitas masyarakat kita secara menyeluruh supaya siap bersaing dengan masyarakat dari negara lain. Keadaan seperti itu sangat potensial menimbulkan hal-hal berikut:

1. Kegelisahan menghadapi persaingan yang tidak mencerminkan kepastian. Dalam kondisi gelisah dan ketidakpastian, orang membutuhkan dukungan dan tempat berkonsultasi dan penyeimbang.
2. Manusia yang bersifat eksplosif atau mudah beringas secara spontan hanya disebabkan oleh hal-hal sepele. Manusia yang seperti itu sesungguhnya membutuhkan faktor penyeimbang dan pengendali kesadaran individualnya.
3. Hubungan antar manusia dan semangat kebersamaan yang kering, karena senantiasa dipengaruhi oleh dorongan materi. Kehangatan hubungan antar manusia merosot, termasuk di lingkungan keluarga.

Agama dalam hal ini sangat penting artinya, baik sebagai pegangan, tempat berkonsultasi, penyeimbang, dan pembawa kehangatan hubungan antar manusia. Dengan demikian, agama akan sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Karena itu, peran pendidikan agama menjadi semakin penting. Jika tidak ada langkah-langkah inovatif dan strategis untuk memacu peningkatan kualitas SDM, yang salah satunya melalui pendidikan Islam, Indonesia dapat menjadi korban di era pergulatan global.

Pada tataran ideal, pendidikan Islam berusaha mengantarkan manusia mencapai keseimbangan pribadi yang bersifat menyeluruh. Dalam Al-Qur'an disebutkan: *Rabbanaa aatinaa fiddunyaa hasanah wa fil aakhirati hasanah waqinaa 'adzaabn naar.*" Hal ini dapat dilihat melalui latihan-latihan kejiwaan, akal pikiran, kecerdasan, perasaan, ataupun panca

indera (Usa, 1991:8). Hanya saja pendidikan Islam dalam era perkembangan ilmu dan teknologi dewasa ini semakin dipertanyakan relevansinya terutama jika dikaitkan dengan kontribusinya bagi pembentukan budaya modern yang sangat dipengaruhi oleh perkembangan ilmu dan teknologi (Karim, 1991: 127). Pendidikan Islam sebagai warisan periode klasik akhir bukan lagi ditegakkan di atas fondasi intelektual-spiritual yang kokoh dan anggun. Diterimanya prinsip dikotomik antara ilmu agama dan ilmu umum adalah salah satu indikasi rapuhnya dasar filosofis pendidikan Islam (Maarif, 1991:18). Dewasa ini, pendidikan Islam khususnya di Indonesia masih cenderung dikonsepsikan sebagai lembaga yang hanya mencetak lulusan (*output*) yang dipersiapkan untuk menjadi tenaga ahli dalam urusan teknis keagamaan semata. Persepsi itu tentu bertentangan dengan idealitas Islam yang diyakini sebagai agama yang diwahyukan kepada Rasulullah Saw. mengandung implikasi kependidikan yang menjadi *rahmatan lilalamin* sebagai pedoman dan penuntun umat manusia dalam semua aspek kehidupan di sepanjang zaman dalam berbagai strata kehidupan dan peradaban umat manusia.

Pengertian Pendidikan Islam

Pendidikan Islam adalah suatu upaya atau proses pencarian, pembentukan, dan pengembangan sikap dan perilaku untuk mencari, mengembangkan, memelihara, serta menggunakan ilmu dan perangkat teknologi atau keterampilan demi kepentingan manusia sesuai dengan ajaran Islam (Feisal, 1995: 96); bukan

hanya dipahami sebatas sebagai ciri khas jenis pendidikan yang berlatar belakang keagamaan.

Dalam konferensi internasional tentang pendidikan Islam I di Mekkah tahun 1977, pengertian pendidikan disebutkan mencakup tiga pengertian sekaligus yakni *tarbiyah*, *ta'lim*, dan *ta'dib*. Maka pengertian pendidik dalam Islam adalah sebagai *murabbi*, *mu'allim*, dan *mu'addib* sekaligus.

Pengertian *murabbi* mengisyaratkan bahwa guru agama harus memiliki sifat-sifat rabbani yaitu nama yang diberikan bagi orang-orang yang bijaksana, terpelajar dalam bidang pengetahuan tentang ar-Rabb (al-Attas, 1980). Di samping itu, guru agama juga harus memiliki sikap bertanggung jawab dan penuh kasih sayang terhadap peserta didik (Thoha, 1996: 11).

Pengertian *mu'allim* mengandung konsekuensi bahwa mereka harus 'alimun (ilmuwan) yakni menguasai ilmu teoritik, memiliki kreativitas, dan komitmen yang tinggi dalam mengembangkan ilmu serta sikap hidup yang selalu menjunjung tinggi nilai-nilai ilmiah di dalam kehidupan sehari-hari.

Sedangkan *ta'dib* memandang bahwa proses pendidikan merupakan usaha yang mencoba membentuk keteraturan susunan ilmu yang berguna bagi dirinya sebagai muslim yang harus melaksanakan kewajiban serta fungsionalisasi atas niat atau sistem sikap yang direalisasikan dalam kemampuan berbuat yang teratur (sistematik), terarah, dan efektif (Feisal, 1995:108). Konsep *ta'dib* mencakup pengertian integrasi antara ilmu dengan amal sekaligus (al-Attas, 1980).

Dari cakupan tiga pengertian pendidikan tersebut, kiranya dapat dipahami bahwa keberadaan pendidikan Islam bukan hanya mentransformasikan ilmu, penampilan, kepekaan rasa (budaya), dan kepekaan agama, tetapi lebih dari itu diharapkan mampu membekali para anak didik dalam mengantisipasi persoalan-persoalan yang sedang dan yang akan dihadapi di masa-masa mendatang. Dengan perkataan lain, pendidikan Islam harus berorientasi ke masa yang akan datang (futuristik).

Keberadaan dan posisi pendidikan Islam dimaksud, sekaligus mempertegas bahwa misi dan tanggung jawab yang diemban pendidikan Islam ternyata lebih berat. Artinya, bagaimana pendidikan Islam di Indonesia dikembangkan dan diletakkan sebagai dasar tumbuhnya kepribadian manusia Indonesia yang paripurna (*insan kamil*), sehingga keberadaannya selalu dibutuhkan dan memberikan kontribusi positif bagi lahirnya masyarakat intelektual.

Pendidikan Islam di Indonesia sebagaimana dikemukakan di atas sudah berkembang sejak abad-abad pertama Islam datang ke Indonesia. Perkembangannya sangat dipengaruhi oleh aliran-aliran atau paham keislaman serta keadaan setempat. Sebagaimana dikatakan Feisal (1995) sejak berkembangnya sistem pendidikan Barat yang berlandaskan filsafat pragmatisme, banyak sistem pendidikan lama baik dalam perumusan tujuan, program, struktur, jenjang, metode, dan evaluasi pendidikannya disesuaikan dengan sistem pendidikan Barat sampai batas tertentu, termasuk lembaga-lembaga pendidikan Islam.

Dalam menguraikan kaitan antara pendidikan nasional dengan pendidikan Islam, maka hal pertama yang harus dipahami, bahwa pendidikan adalah fenomena sosial dan pelaksanaan pendidikan sangat ditentukan oleh kekuatan spiritual, intelektual, dan material peradaban masyarakat di mana sistem pendidikan itu berjalan (Ibnu Khaldun, 1983). Oleh karena itu, pendidikan Islam di Indonesia tak bisa lepas dari proses sosial kultural dan politik yang berkembang di negeri ini.

Menurut Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional (UUSPN), pendidikan agama mempunyai peran yang sangat besar dalam pencapaian tujuan pendidikan Nasional. Dari rumusan ini nampak nyata peran pendidikan agama sebagai motivator dan penggerak potensi anak didik agar berperanan dalam pembangunan nasional dan sekaligus merupakan benteng penanggulangan dampak negatif modernisasi dan dalam menghadapi perubahan sosial. Oleh karena itu, pendidikan agama harus berada di semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan baik negeri maupun swasta.

Perkembangan berikutnya, pendidikan nasional akhir abad XX memberi peluang cukup bagus terhadap pendidikan Islam. Hal ini seperti dikatakan Thoha (1996) dapat terlihat dari praktek pendidikan di mana keuntungan pendidikan Islam adalah: pertama, tujuan pendidikan nasional untuk meningkatkan keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa; kedua, eksistensi kurikulum pendidikan agama dalam pendidikan formal semakin mantap; ketiga, eksistensi pendidikan agama dalam pendidikan infor-

mal ditegaskan dalam UUSPN No. 2/1989; dan keempat, eksistensi lembaga pendidikan keagamaan diakui sama dengan jenis pendidikan lainnya. Hal ini juga menunjukkan bahwa dengan dimasukkannya pendidikan Islam sebagai suatu keputusan politik —pendidikan Islam adalah subsistem dari sistem pendidikan nasional— membawa keuntungan yang besar. Sebab, apabila pendidikan Islam menempatkan dirinya di luar sistem pendidikan nasional, akibatnya ia akan terisolir dari percaturan politik dan juga akan kehilangan peluang untuk berpartisipasi dalam pembangunan.

Eksistensi sistem pendidikan Islam di Indonesia dalam kerangka sistem pendidikan nasional dari masa ke masa dalam pengembangannya memperlihatkan nuansa yang variatif. Kenyataan sejarah menunjukkan bahwa pada periode H.A Mukti Ali sebagai Menteri Agama RI, beliau menawarkan konsep alternatif pengembangan madrasah melalui SKB 3 Menteri yang berusaha mensejajarkan kualitas madrasah dengan sekolah umum, dengan porsi kurikulum 70% umum dan 30% agama. Dilihat dari isu sentralnya, H.A. Mukti Ali rupanya ingin mendobrak pemahaman masyarakat yang bernada sumbang terhadap eksistensi madrasah, dimana madrasah selalu didudukkan dalam posisi marginal, karena hanya berkuat pada kajian masalah keagamaan Islam dan miskin pengetahuan umum, sehingga *output*-nya kurang diperhitungkan oleh masyarakat. Pada periode Menteri Agama Munawir Sadzali, beliau menawarkan konsep MAPK untuk menjawab problem kelangkaan ulama dan

umat Islam yang menguasai kitab-kitab berbahasa Arab serta ilmu-ilmu keislaman, yang sekarang ini ditetapkan sebagai Madrasah Aliyah Keagamaan (MAK).

Sebagaimana tertuang dalam kurikulum 1994, madrasah adalah sekolah yang berciri khas agama Islam dengan ciri-ciri sebagai berikut:

- 01) Mata pelajaran keagamaan yang dijabarkan dari pendidikan agama Islam dan
- 02) Suasana keagamaan yang berupa: suasana kehidupan madrasah yang agamis, adanya sarana ibadah, penggunaan metode pendekatan yang agamis dalam pelajaran bagi setiap mata pelajaran yang memungkinkan; dan kualifikasi guru yang harus beragama Islam dan berakhlak mulia, di samping memenuhi kualifikasi sebagai tenaga pengajar berdasar ketentuan yang berlaku.

Tampaknya kedua pendekatan tersebut sulit tercipta di madrasah bilamana tidak didukung oleh komitmen akademis-religius dan profesional-religius dari para pengelola dan pembinanya. Dikhawatirkan pendekatan keilmuan akan tertindih oleh pendekatan keagamaan, sehingga penjabaran mata pelajaran pendidikan agama Islam ke dalam sub-sub mata pelajaran tersebut akan kehilangan makna. Atau sebaliknya, bisa jadi pendekatan keagamaan tertindih oleh pendekatan keilmuan sehingga pendidikan agama Islam menjadi Islamologi yang hanya menekankan *intellectual exercise* dan suasana keislaman tidak ter-

cipta di madrasah sebagai sekolah yang berciri khas agama Islam.

Ciri khas yang kedua mengandung makna perlunya menciptakan suasana agamis yang kondusif di madrasah. Suasana agamis yang dimaksud bukan sekadar bermakna simbolik, tetapi lebih jauh dari itu, berupa penanaman dan pengembangan nilai-nilai religius keislaman pada setiap bidang pelajaran yang termuat dalam program pendidikannya. Konsekuensinya, diperlukan guru-guru yang mampu mengintegrasikan wawasan imtaq dan iptek, diperlukan buku-buku teks yang bernuansa agamis dan bermuatan pesan-pesan agamis pada setiap bidang atau mata pelajaran yang diprogramkan. Hal ini juga merupakan tantangan bagi IAIN/STAIN sebagai lembaga pendidikan tinggi Islam yang program-program pendidikannya, sepatutnya harus di arahkan pada pengembangan kemampuan mengintegrasikan wawasan imtaq dengan iptek.

Permasalahan Pendidikan Islam di Indonesia

Hingga saat ini, masih ada beberapa permasalahan yang dihadapi pendidikan Islam di Indonesia, baik mengenai hubungannya dengan keseluruhan sistem pendidikan Indonesia, maupun mengenai struktur internal yang terdapat dalam tubuh pendidikan Islam Indonesia dewasa ini.

Pertama, pada kenyataannya, pendidikan Islam belum mampu bersaing dengan pendidikan lain dalam membangun umat yang mayoritas berpenduduk muslim ini, walaupun keputusan politik telah

mencantumkan pendidikan Islam sebagai sub sistem pendidikan nasional. Hal yang demikian ini terjadi karena hubungan antara pendidikan Islam dengan keseluruhan sistem pendidikan nasional Indonesia kurang akrab. Hubungan yang ada pada umumnya masih bersifat nominal belum sampai ke tingkat hubungan yang fungsional.

Posisi demikian memberikan kesan bahwa pendidikan Islam sebagai sebuah lembaga yang seolah tidak adaptif bahkan terkesan selalu ketinggalan zaman. Pada gilirannya, pendidikan Islam menjadi tidak berdaya mengejar ketinggalannya melalui lompatan-lompatan yang berarti sesuai arus perubahan, apalagi dalam memenuhi selera konsumen. Kondisi berikutnya, pendidikan Islam di Indonesia menghasilkan *output* yang sebagian besar tidak siap untuk memasuki lapangan kerja tertentu.

Kedua, masih terbatasnya dana dan tenaga ahli. Alokasi subsidi pemerintah untuk pendidikan Islam masih jauh lebih minim dibandingkan subsidi sektor lain, termasuk pendidikan umum. Pada Repelita VI 1994/1995 sampai dengan 1998/1999 anggaran PTA misalnya mengalokasikan dana untuk bidang pendidikan tinggi agama sebesar Rp. 206.750.000.000. Anggaran ini masih sangat kecil bila dibandingkan dengan pembangunan pada sektor yang sama dalam pendidikan. Dana dimaksud sudah mencakup untuk keperluan pengadaan fisik (perangkat keras) dan untuk pembinaan tenaga pengelola pendidikan Islam secara keseluruhan. Tentu saja ini akan berdampak pada aktivitas pen-

didikan, terlebih pada lembaga-lembaga pendidikan Islam swasta (madrasah-madrasah) sebagai lembaga pendidikan mayoritas yang kurang mendapatkan perhatian. Kecuali itu, pengadaan tenaga-tenaga profesional yang dialokasikan pada sekolah-sekolah swasta (madrasah-madrasah) hampir tidak ada. Untuk madrasah Ibtidaiyah, Tsanawiyah, maupun Aliyah swasta, hampir 90% tenaga gurunya terdiri dari alumni sekolah bersangkutan. Sehingga dapat dijumpai bahwa alumni Madrasah Aliyah menjadi guru pada Madrasah Tsanawiyah. Bahkan, ada yang dipaksakan menjadi guru pada Madrasah Aliyah. Sementara itu, droping tenaga guru negeri masih belum bisa menjangkau madrasah swasta, sebab untuk madrasah negeri saja sampai saat ini masih sangat terbatas, terlebih dengan diterapkannya kurikulum 1994.

Ketiga, pada umumnya praktek pendidikan Islam di Indonesia belum sampai pada tahap pendidikan nilai. Tekanannya masih pada pengenalan teori untuk masukan-masukan kognitif taraf rendah. Sementara itu, seperti diungkapkan Chabib Thaha (1996) tujuan pendidikan yang berwawasan nilai adalah proses pendidikan yang sampai kepada hakekat ilmu dan teknologi, tidak hanya pada kulit luarnya. Dengan begitu, kualitas pendidikan dapat diandalkan, sebab kualitas alumni pendidikan jenis ini tidak hanya membentuk manusia cerdas dan terampil yang berkepribadian, melainkan manusia yang memiliki kepribadian yang mampu mendukung pembangunan nasional. Hanya saja, pengembangan proses pendidikan berwawasan nilai sangat

ditentukan oleh kualitas pendidik, yakni pendidik yang memiliki kemampuan untuk menghayati ilmu, mengetahui rahasia ilmu yang diajarkan, kekuatan dan kelemahan teori-teori, serta keterbatasan validitasnya.

Keempat, pemahaman yang dikotomi. Pemahaman dikotomi ini terlihat dengan jelas pada praktek dualisme sistem pendidikan di Indonesia. Sebagai seorang muslim kita meyakini bahwa ilmu pengetahuan itu satu, yaitu berasal dari Allah SWT. Nabi Adam AS sebagai manusia pertama dan sekaligus juga Rasul Allah yang pertama telah diajarkan Allah tentang nama-nama semuanya atau rahasia dan manfaat segala sesuatu (QS. 2: 31), mengantarkan menjadi makhluk termulia dimana para malaikat diperintahkan bersujud kepadanya. Artinya, keunggulan manusia (Adam) atas malaikat hingga dia diangkat sebagai khalifah di muka bumi adalah karena Adam diberikan kelebihan menguasai IPTEK. "Barangsiapa ingin menggapai dunia hendaklah dengan ilmu; barangsiapa ingin meraih kebahagiaan akhirat, harus dengan pengetahuan; dan apabila anda ingin menguasai keduanya hendaklah menguasai ilmu pengetahuan" (Al-Hadits).

Di zaman keemasan Islam, ilmu dipelajari secara utuh, baik yang diperlukan untuk mencapai kebahagiaan dunia maupun akhirat. Karena itu, muncul nama-nama seperti Ibnu Sina, Al-Farabi, Ibnu Rusyd, Al-Ghazali dan sederet nama pakar ilmu pengetahuan lainnya yang telah mengukir sejarah keemasan Islam. Perkembangan berikutnya, seiring dengan hancurnya pusat

ilmu pengetahuan di Baghdad oleh serbuan bangsa Mongol kemudian diumumkan bahwa ijtihad sudah tertutup. Akibatnya, muncul segolongan umat Islam yang menjauhi pengetahuan umum, karena dianggap mendorong ke arah kekufuran. Di pihak lain, ada segolongan umat Islam yang menguasai ilmu pengetahuan yang cenderung meremehkan peran agama, karena agama dianggap kolot dan anti kemajuan. Inilah yang kemudian dipropagandakan sebagai dikotomi ilmu.

Tawaran Pendekatan

Paparan di atas memberikan gambaran yang cukup jelas, bahwa potensi lembaga pendidikan Islam yang dimiliki umat Islam di Indonesia, baik yang berbentuk madrasah, sekolah, maupun perguruan tinggi masih belum berdaya untuk memberikan kontribusi positif bagi lahirnya suatu masyarakat (manusia) paripurna (*insan kamil*) serta belum memiliki kemampuan untuk menjawab permasalahan umat dalam menatap era kemajuan yang bergerak cepat sesuai arus perubahan sosial. Keadaan ini menuntut kita untuk melakukan pembenahan dan pengembangan dengan mencoba mencari formulasi kerangka ideal pengembangan pendidikan Islam.

Setidak-tidaknya ada tiga pendekatan yang bisa ditawarkan yaitu: (1) Islamisasi Iptek, (2) legalitas kelembagaan dan pengakuan profesional, dan (3) pendekatan substantif. Dalam pendekatan pertama, Islamisasi ilmu pengetahuan; para cendekiawan muslim dari berbagai penjuru dunia sudah mengadakan berbagai pertemuan internasional. Tercatat tokoh-tokoh seperti Ismail Al-

Faruqi, Naquib Al-Attas, Hassan Bilgrami, dan Ziauddin Saardar, merupakan tokoh-tokoh handal dalam melaksanakan proyek Islamisasi ilmu. Hanya saja, upaya ini ditentang oleh Profesor Dr. Muhammad Arkoum yang menganggap bahwa Islamisasi IPTEK sebagai suatu kesalahan, sebab hal ini dapat menjebak kita pada pendekatan yang menganggap Islam hanya semata-mata sebagai ideologi. (Usa, 1991).

Terlepas dari adanya perbedaan persepsi antara para cendekiawan muslim di dunia Islam dalam menyikapi upaya Islamisasi ilmu, bagi Indonesia yang merupakan pusat konsentrasi penganut Islam terbesar di dunia, tampaknya ide besar ini belum diupayakan, tetapi hanya baru dalam tahap perbincangan para pakar.

Islamisasi ilmu pengetahuan ini bukan saja akan menghilangkan praktek dikotomik sistem pendidikan kita, tetapi juga akan mengikis dikotomi lembaga pendidikan dan dikotomi dalam menyikapi lembaga pendidikan seperti yang terjadi selama ini di Indonesia.

Kedua, pendekatan legalitas kelembagaan dan pengakuan profesional sebagai salah satu dampak Islamisasi Iptek. Pada UU Sisdiknas No. 20 tahun 2003 dimana pendidikan agama Islam, termasuk dan termuat di dalamnya, merupakan wujud suatu legalisasi. Kendati demikian, pendidikan tentunya tidak hanya berhenti pada formalitas, tetapi lebih di arahkan kepada kualitas yang sebenarnya. Kalau pengakuan legalitas kelembagaan ini dilakukan secara formal dan dibarengi langkah-langkah kongkrit-operasional, tentu saja pengakuan profesionalisme

akan termasuk di dalamnya. Alumni pendidikan umum dan pendidikan Islam pada saatnya harus mendapatkan sikap dan pengakuan profesionalisme yang sama. Mereka harus diberikan kesempatan yang sama dalam membangun bangsa yang mayoritas penduduknya muslim ini. Oleh karena itu, penataan substansial yang mencakup kurikulum dan kualitas pendidik menjadi sangat mendesak.

Ketiga, pendekatan substansial (kurikulum pendidikan Islam dan kualitas pendidik) menjadi semakin penting karena menyentuh langsung jantung pendidikan. Beberapa kali pergantian kurikulum sebagai upaya peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia telah dilakukan, dan terakhir diberlakukan kurikulum pendidikan dasar dan menengah berciri khas agama Islam. Pendidikan dasar merupakan program pendidikan 6 tahun di Sekolah Dasar (SD) dan atau Madrasah Ibtidaiyah (MI) dan program pendidikan 3 tahun di Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) dan atau Madrasah Tsanawiyah (MTs). Sedangkan pendidikan menengah merupakan program pendidikan 3 tahun di Sekolah Menengah Umum (SMU) dan atau Madrasah Aliyah (MA).

Kurikulum pendidikan dasar pada MI dan MTs adalah sama dengan kurikulum pendidikan dasar pada SD dan SLTP dengan tambahan program ciri khas Agama Islam. Sementara kurikulum pendidikan menengah pada Madrasah Aliyah (MA) sama dengan kurikulum sekolah menengah umum (SMU) dengan tambahan ciri khas Agama Islam.

Secara rinci tergambar alokasi pendidikan agama Islam di MI ha-

nya tersedia 35 jam pelajaran, sementara pendidikan umumnya terdiri dari 330 jam. Untuk MTs pendidikan agama Islamnya terdiri dari 27 jam; sementara pendidikan umum tersedia alokasi sebanyak 135 jam pelajaran. Begitu juga pada MA, alokasi pendidikan agama hanya tersedia 15 jam ditambah dengan 6 jam materi bahasa Arab; sementara untuk pendidikan umum teralokasi 122 jam pelajaran.

Kurikulum terbaru ini kiranya dapat membawa angin segar dalam pengembangan pendidikan Islam di Indonesia bila diawali atau dibarengi dengan suatu proses Islamisasi IPTEK terlebih dahulu. Hanya saja, konsep dikotomi yang sampai saat ini masih melekat dan belum terpecahkan akhirnya mengantarkan kurikulum dimaksud membawa kesan: *Pertama*, umat Islam sebagai komunitas terbesar di Indonesia terasa semakin dinafikan, dimana ciri khas kepribadian pendidikan Islam itu sendiri menjadi tidak terlihat. Dan yang nampak hanya pendidikan umum berciri khas Agama Islam. *Kedua*, kurikulum ini terkesan terlalu banyak pencabangan ilmu (proliferasi) sehingga beban yang dipikul peserta didik terlalu berat. Sebenarnya, modifikasi pendidikan umum bisa saja dilakukan tanpa harus mengurangi atau bahkan memangkas materi pelajaran agama sebagai ciri khas kepribadian pendidikan Islam dan *ketiga*, kurikulum ini terkesan cenderung menghantarkan *output*-nya untuk lebih memprioritaskan perguruan tinggi umum sebagai alternatif melanjutkan studi, dan sebenarnya cukup membawa dampak positif sekaligus membanggakan. Hanya saja, yang terja-

di kemudian adalah bahwa *input* bagi lembaga pendidikan tinggi agama termasuk IAIN/STAIN menjadi sangat minim. Kalaupun ada barangkali harus puas dengan kualitas-kualitas kelas dua yang tidak terjaring dalam UMPTN; sementara dengan modal pendidikan agama yang diperolehnya sejak MI, MTs, dan MA masih belum mampu menghantarkannya memiliki kepribadian yang tangguh dalam keimanan dan ketaqwaan (IMTAQ).

Satu hal yang membawa angin segar dalam proses pengembangan kualitas Pendidikan Tinggi Agama ialah adanya keputusan Menteri Agama nomor 383 tahun 1997 tentang Kurikulum Nasional Program Sarjana S1 Institut Agama Islam (IAIN) yang disempurnakan dan Kurikulum Nasional Program Sarjana S1 Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN); sebagai upaya peningkatan SDM, antisipasi terhadap proses globalisasi serta diharapkan mampu memberikan jawaban terhadap tuntutan perubahan yang terjadi, tanpa harus meninggalkan ciri kepribadiannya sebagai lembaga pendidikan Islam.

Karenanya, akan terlihat komposisi yang dimaksud berupa kurikulum nasional terdiri dari 60% (87 SKS) mencakup 24 SKS mata kuliah umum (MKDU), 30 SKS mata kuliah dasar keahlian (MKDK), dan 33 SKS mata kuliah profesi atau keahlian (MKK); dan ditambah dengan kurikulum lokal mencapai 40% (57 SKS) tersebar dalam delapan semester. Kurikulum lokal ini ditentukan sepenuhnya oleh IAIN/STAIN sendiri; dan posisinya dapat difungsikan untuk menampung program remedial, pendalaman profesi, dan

pengayaan tambahan (alternatif) serta spesifik (Dirjen Binbagais, 1997). Termasuk di dalamnya komputerisasi, kewirausahaan, dan manajemen perekonomian.

Hanya saja, suatu pembenahan yang berkelanjutan harus selalu dilakukan agar anekdot yang pernah dilontarkan Fadjar (1995): "Ganti menteri ganti kebijakan"; bukan merupakan kekhawatiran yang berkepanjangan. Dus, dituntut adanya suatu kebijakan nasional.

Kesimpulan

Dari paparan di atas, dapat disimpulkan:

1. Konsepsi ideal pendidikan Islam adalah sebuah proses transformasi dan internalisasi ilmu pengetahuan dan nilai-nilai yang Islami pada diri anak didik melalui penumbuhan dan pengembangan potensi fitrahnya. Tujuannya adalah mencapai keselarasan dan kesempurnaan hidup di segala aspek untuk masa kini dan masa depan hingga tercipta kepribadian muslim sejati yang disebut *insan kamil*.
2. Upaya-upaya yang dapat dilakukan dalam rangka kembali ke konsep ideal pendidikan Islam adalah dengan memformulasikan kerangka ideal pengembangan pendidikan Islam melalui pendekatan sebagai berikut :
 - a. Islamisasi IPTEK
 - b. Legalitas kelembagaan dan pengakuan profesional, dan
 - c. Pendekatan substansial
3. Efektifitas dan efisiensi ketiga model pendekatan di atas hendaklah didukung dan diikuti

dengan tindakan sebagai berikut:

- a. Upaya mengembangkan suatu kurikulum yang lebih antisipatoris, lebih berorientasi ke masa depan. Bahan-bahan pengajaran agama Islam hendaknya selalu diintegrasikan dengan problem empiris yang terjadi di lingkungan sekitar agar anak didik tidak memperoleh pemahaman keagamaan yang segmentatif.
- b. Upaya menciptakan suasana belajar yang lebih partisipatoris dan mendorong kerjasama yang lebih besar antara guru dan murid. Di sinilah perlunya pengembangan wawasan emansipatoris dalam penyelenggaraan pendidikan agama Islam, sehingga anak bisa memperoleh kesempatan berpartisipasi dalam rangka menumbuhkan kemampuan metodologis dengan memadai untuk mempelajari substansi atau materi agama Islam.
- c. Upaya menciptakan jaringan pusat kegiatan belajar dalam masyarakat. Hal ini dimaksudkan agar anak mempunyai kemampuan mengaktualkan agama Islam sebagai sebuah sistem yang bermakna dalam mendefinisikan setiap keadaan dari sudut refleksi iman dan ilmu pengetahuan.

*Tulisan ini telah dipresentasikan pada Pidato Pengukuhan Guru Besar Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Mataram, 1998.

Daftar Pustaka

Al-Quran dan Terjemahnya.

A. Malik Fajar, *Pergumulan Pemikiran Pendidikan Tinggi Islam*, Penerbitan Mahasiswa Bestari Universitas Muhammadiyah Malang, Malang, 1995.

Badan Pertimbangan Pendidikan Nasional, *Pendidikan Sedini Mungkin*, Jakarta, 1992.

Cece Wijaya (Dkk), *Upaya Pembaharuan dalam Pendidikan dan Pengajaran*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 1992.

Chabib Thaha, (dkk), *Reformasi Filsafat Pendidikan Islam*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1996.

Dewan Pimpinan Pusat Gabungan Usaha Pembaharuan Pendidikan Islam, *Pembaharuan Pendidikan Islam dan Peraturan Perundangan Tentang Sistem Pendidikan Nasional*, Jakarta, 1993.

H.M., Arifin, *Kapita Selekta Pendidikan Islam (Islam dan Umum)*, Bumi Aksara, Jakarta, 1991.

_____, *Filsafat Pendidikan Islam*, Bumi Aksara, Jakarta, 1994.

Hasan Langgulang, *Beberapa Pemikiran Tentang Pendidikan Islam*, Al-Ma'arif, Bandung, 1980.

John Veizei, *Pendidikan di Dunia Modern*, Gunung Agung, Jakarta, 1978.

Kuntowijoyo, *Paradigma Islam*, Mizan, Bandung, 1991.

Muslih Usa, *Pendidikan Islam di Indonesia Antara Cita dan Fakta*, Tiara Wacana, Yogyakarta, 1991.

Muhammad Qutb, *Sistem Pendidikan Islam*, Al-Maarif, Bandung, 1998.

Muhammad Junus, *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia*, Hidakarya Agung, Jakarta, 1984.

Yusuf Amir Faisal, *Reorientasi Pendidikan Islam*, Gema Insani Press, Jakarta, 1995.

Zuhairini, *Sejarah Pendidikan Islam*, Departemen Agama, Jakarta, 1986.